

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam pembangunan negara. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu, untuk mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan, baik subjek maupun objek pajak yang ada. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung namun digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 menjelaskan bahwa Undang-Undang ini mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak yang berhubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak, maka wajib pajak bisa menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan menggunakan tahun buku yaitu jangka waktu yang meliputi 12 (dua belas) bulan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium dan juga tunjangan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri yang dilakukan oleh pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah maupun perusahaan. Penghasilan yang dipotong setiap bulan merupakan jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan, iuran dan penghasilan tidak kena pajak yang jumlahnya tergantung pada wajib pajak. Pemungutan, pembayaran serta perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 telah diatur dalam undang-undang peraturan perpajakan yang berlaku dan sesuai. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 46 2010 pajak penghasilan didefinisikan : “Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur merupakan perusahaan penyedia jasa kelistrikan terbesar di Indonesia. Dengan visi untuk “Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani”, PT. PLN (Persero) berkomitmen untuk melistriki seluruh Nusantara. Potensi insani merupakan aset terbesar dan masa

depan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, karenanya PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur berinvestasi besar untuk mendapatkan calon-calon pemimpin masa depan yang akan mengembangkan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur menjadi Perusahaan Kelas Dunia dan menghadapi tantangan bisnis di masa yang akan datang. Kesempatan berkarier di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sangatlah luas karena rentang bisnis dari hulu sampai hilir, mulai dari Pembangkitan, Transmisi hingga Distribusi Listrik ke pelanggan serta jasa-jasa pendukungnya. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur merupakan perusahaan atau badan yang memungut pajak penghasilan atas gaji karyawan, upah, honorarium dan juga tunjangan yang tergolong dalam Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Badan disini maksudnya adalah pajak penghasilan atas gaji karyawan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh PT. PLN (Persero) sendiri. Karena besarnya sumber penerimaan penghasilan atas gaji pegawai yang diterima oleh perusahaan maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR”**.

1.2 Penjelasan Judul

Analisis adalah suatu penelitian yang digunakan untuk mengetahui perkembangan dan kinerja perusahaan pada suatu laporan keuangan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Perhitungan adalah suatu rumusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Pelaporan adalah kewajiban Wajib Pajak dalam menyusun dan menyerahkan SPT Masa terhadap Pajak sesuai dengan batas yang ditentukan oleh Pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas gaji, upah, honorarium, dan juga tunjangan terhadap wajib pajak berdasarkan biaya-biaya yang dikurangkan dari biaya jabatan, iuran serta penghasilan tidak kena pajak yang lainnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang, maka ada beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ?
2. Apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka terdapat beberapa tujuan dilakukan penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

2. Untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini dapat digunakan untuk:

1. Peneliti

Sebagai sarana atau media untuk belajar menyusun laporan tugas akhir dengan sistematika yang benar sesuai dengan pedoman tugas akhir.

2. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Membantu mencari informasi tentang mekanisme dan pelaporan yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

3. STIE Perbanas Surabaya

Membantu pembaca menambah pengetahuan dan referensi tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan penulis, diantaranya:

- a. Metode Wawancara

Mengumpulkan data dengan pihak bagian akuntansi perpajakan, SDM dan pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

- b. Metode Observasi

Melakukan pengamatan langsung diperusahaan untuk memperoleh data mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

c. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari literatur berupa referensi dan jurnal serta laporan keuangan perusahaan yang digunakan untuk mengumpulkan data.

1.6.2 Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif karena mendeskripsikan atau menggambarkan suatu penelitian ini mendeskripsikan tentang analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.